

## Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Untuk Meningkatkan Efektivitas Penganggaran Di Kementerian

Tia Fahda Absyari <sup>1</sup>, Sonny Fransisco Siboro <sup>2</sup>, Maulida Hasanah <sup>3</sup>, Rianyta Tanjung <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Bina Sarana Informatika

<sup>1</sup>[tiafahda23@gmail.com](mailto:tiafahda23@gmail.com), <sup>2</sup>[sonny.sof@bsi.ac.id](mailto:sonny.sof@bsi.ac.id), <sup>3</sup>[maudyhsn25@gmail.com](mailto:maudyhsn25@gmail.com), <sup>4</sup>[rianytatanjung27@gmail.com](mailto:rianytatanjung27@gmail.com)

Alamat: Jl. Margonda No.8, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Korespondensi penulis: [tiafahda23@gmail.com](mailto:tiafahda23@gmail.com)

**Abstract.** *The Indonesian government executes Government Bookkeeping Measures (SAP) to extend straightforwardness and responsibility in state financial management. One of the most goals of actualizing SAP is to extend the adequacy of budgeting in ministries. Executing SAP in government bookkeeping benchmarks is an imperative step to extend the viability of budgeting in services. This consider or extend centers on actualizing SAP to disentangle the budgeting prepare within the service. This may include joining arranged costs with the budget, overseeing the budget in different ways, and utilizing SAP highlights such as the budget discharge work.*

**Keywords:** *Candor, State financial management, Feasibility of budgeting.*

**Abstrak.** Pemerintah Indonesia melaksanakan Tindakan Pembukuan Pemerintah (SAP) untuk memberikan keterusterangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu tujuan utama dari penerapan SAP adalah untuk meningkatkan kecukupan penganggaran di kementerian. Melaksanakan SAP dalam tolok ukur pembukuan pemerintah merupakan langkah penting untuk memperluas kelayakan penganggaran di bidang jasa. Pertimbangan atau perluasan ini berpusat pada aktualisasi SAP untuk mengurai persiapan penganggaran dalam layanan. Hal ini dapat mencakup menggabungkan biaya-biaya yang telah diatur dengan anggaran, mengawasi anggaran dengan berbagai cara, dan memanfaatkan fitur-fitur SAP seperti pekerjaan pelepasan anggaran.

**Kata Kunci :** Keterusterangan, Pengelolaan keuangan negara, Kelayakan penganggaran.

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

SAP merupakan seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah. SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, sehingga dapat menjadi dasar yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang efektif.

Salah satu tujuan utama penerapan SAP adalah untuk meningkatkan efektivitas penganggaran di kementerian. Penganggaran merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran yang efektif dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. gelolaan anggaran di sektor pemerintahan menjadi krusial untuk mencapai efektivitas dan transparansi. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah menjadi landasan yang penting dalam memperbaiki proses penganggaran di berbagai lembaga pemerintah, termasuk di lingkungan kementerian. Dengan menerapkan SAP, diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi, akurasi, dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan penganggaran yang dilakukan.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implemtati standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat mempengaruhi efektivitas penganggaran
- b. Bagaimana SAP meningkatkan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran di kementerian

### **Tujuan**

- a. Memberikan informasi tentang pengaruh penerapan SAP terhadap efektivitas penganggaran di kementerian
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penerapan SAP dan efektivitas penganggaran di kementerian.

## **1. Kualitas Laporan Keuangan**

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan akan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selama satu periode pelaporan. Secara khusus tujuan pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang digunakan. Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada (Mulia,

2019)

Tabel 1. contoh penyajian data tingkat implementasi SAP di kementerian:

Sumber: xxxxx (9999)

Bentuk gambar mengikuti contoh berikut:



## **METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan adalah metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Metode ini juga sering di sebut library research atau literatur rewiw merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mencari informasi dan data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku,jurnal ilmiah,artikel dan laporan penelitian sumber ini gapat di temukan di perpustakaan,internet DLL

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi Menurut D. Van Meter dan C. Van Horn (a model of the policy implementation process) dalam

Leo Agustino (2017, hal. 133) terdapat 6 variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi implementor (sikap para pelaksana),

- a. Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas SDM, seperti kompetensi, pelatihan, dan pengalaman, sangat penting untuk memahami dan menerapkan akuntansi pemerintahan secara efektif.
- b. Komunikasi: Komunikasi yang efektif antar pihak internal, seperti pimpinan kementerian, pejabat keuangan, dan staf pelaksana, sangat penting untuk kelancaran implementasi.
- c. Komitmen Organisasi: Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran kementerian untuk mendukung implementasi akuntansi pemerintahan sangatlah penting.
- d. Sistem Informasi: Sistem informasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintahan lainnya sangat penting untuk mendukung proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan.
- e. Budaya Organisasi: Budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dapat mendorong implementasi akuntansi pemerintahan yang efektif.
- f. Kepemimpinan: Gaya kepemimpinan yang visioner dan transformasional dapat memotivasi dan mengarahkan pegawai untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan dengan baik.

Tabel: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Desember 2022

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki)	Pegawai Negeri Sipil (Perempuan)	Pegawai Negeri Sipil (Laki-Laki + Perempuan)
Sekolah Dasar (SD) <i>Primary School</i>	11.474	1.009	12.483
Sekolah Menengah Pertama (SMP) <i>Junior High School</i>	22.497	2.537	25.034
Sekolah Menengah Atas (SMA) <i>Senior High School</i>	264.273	136.168	400.441
Diploma I/Akta I <i>Diploma I/Akta I</i>	1.892	5.011	6.903
Diploma II/Akta II <i>Diploma II/Akta II</i>	26.756	33.447	60.203

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGANGGARAN DI KEMENTERIAN**

Diploma III/Akta III <i>Diploma III/Akta III</i>	83.799	266.389	350.188
Diploma IV/Akta IV <i>Diploma IV/Akta IV</i>	17.249	35.124	52.373
S1/Sarjana <i>Under Graduate/ Bachelor</i>	715.957	1.070.041	1.785.998
S2/Pasca Sarjana <i>Graduate</i>	134.477	115.850	250.327
S3/Doktor/Ph.D <i>Post Graduate</i>	1.800	654	2.454
Jumlah/ Total	1.280.174	1.666.230	2.946.404

Keterangan :

Tidak termasuk PNS pusat. Angka provinsi hanya menampilkan PNS provinsi (tidak mencakup PNS kabupaten/kota)

Deskripsi variabel dari 123 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

ikut :

**Tabel. 1 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SAP	123	36	55	47,44	4,664
Kompetensi SDM	123	21	40	34,37	4,350
Good Governance	123	54	90	76,02	8,471
Kualitas Laporan Keuangan	123	12	20	17,10	1,720
Sistem Pengendalian Internal	123	30	45	39,90	3,143
Valid N (listwise)	123				

Berdasarkan data tersebut, hasil penyelidikan dengan menggunakan pengukuran grafik pada variabel pelaksanaan Tindakan Pembukuan Pemerintah muncul nilai rendah sebesar 36, dan nilai tinggi sebesar 55, mean sebesar 47,44 dengan standar deviasi 4,664. Dari keterangan responden menjawab pada rentang 4, 3 dan 5 sehingga pada tabel pelaksanaan Pedoman Pembukuan Pemerintah mengalami perubahan jawaban. Selain itu, hasil pemeriksaan dengan menggunakan wawasan grafis pada variabel Kompetensi Aset Manusia diperoleh nilai terkecil sebesar 21, nilai tertinggi sebesar 40, kejam sebesar 34,37 dengan standar deviasi sebesar 4,350. Dari data tersebut responden menjawab pada angka 4 dan 71, ada pula yang menjawab

5, 3 dan 2, sehingga untuk variabel kompetensi aset manusia jawabannya berubah. Variabel Administrasi Besar mempunyai nilai terkecil sebesar 54, nilai terbesar sebesar 90, nilai kejam sebesar 76,02 dengan standar deviasi sebesar 8,471. Dari keterangan tersebut, responden menjawab pada angka 4 dan angka 5, 3 dan 2, sehingga untuk variabel Administrasi Agung jawabannya bergeser. Kemudian pada variabel kualitas laporan anggaran muncul nilai terkecil sebesar 12, nilai terbesar sebesar 20, nilai terendah sebesar 17,10 dengan standar deviasi sebesar 1,720. . Dari informasi tersebut responden menjawab antara 4 dan beberapa 5 dan 3, sehingga untuk variabel kualitas laporan keuangan jawabannya bergeser. Untuk variabel Sistem Pengendalian Dalam diperoleh nilai minimum sebesar 30, nilai tertinggi sebesar 45, nilai kejam sebesar 39.90 dengan standar deviasi sebesar 3.143. Dari data tersebut responden menjawab dalam rentang 4 dan beberapa 5, 3, 2 dan 1, sehingga variabel Inside Control Framework telah menggeser jawaban. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai normal yang paling besar adalah pada variabel Administrasi Agung sebesar 76,02, sedangkan nilai normal terkecil pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 17,10. Standar deviasi terbesar terdapat pada variabel Administrasi Agung sebesar 8,471 dan terkecil pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 1,720. aplikasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa interaksi Sistem Pengendalian Internal dan penerapan. Tolak Ukur Pembukuan Pemerintah dapat memajukan kualitas laporan terkait uang. Hadirnya kerangka pengendalian internal mampu memantapkan desain hubungan antara pelaksanaan Tindakan Pembukuan Pemerintah dengan kualitas laporan terkait uang.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan pembukuan keuangan segmen terbuka dan pelaksanaan pengawasan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara sebagian besar maupun secara bersamaan. Artinya, baik sebagian atau sekaligus, apabila kualitas petunjuk perundang-undangan tercermin dalam penerapan pedoman adat dan pedoman materialitas, maka ada kaitannya; pembukuan keuangan bagian terbuka dilaksanakan dan memperhatikan komponen-komponen yang meliputi antara lain standar yang harus dipenuhi, laporan, anggaran dan pemeriksaan dilaksanakan; Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penggunaan pembukuan moneter divisi terbuka, pengawasan dan kualitas laporan terkait uang pemerintah berdampak pada tanggung jawab pelaksanaan kantor pemerintah baik secara

sebagian besar maupun pada saat yang bersamaan. Hal ini berarti bahwa pada saat tertentu atau pada saat yang sama ketika penetapan kualitas dilaksanakan; semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah; dan pelaksanaan pengawasan yang memuaskan; ini akan meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan kantor-kantor pemerintah.

**(Septian Asriadi Putra<sup>1</sup>, 2021)**

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pamungkas, B. (2012). *PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.*
- Putri Dwi Rahmadani<sup>1</sup>, N. Z. (2021). *PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN .*
- Septian Asriadi Putra<sup>1</sup>, R. J. (2021). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual .*